



available online at:

<https://cakrawala.stieswadaya.ac.id/cakrawala/index.php/cakrawala>

Vol.28 No.1
Januari
(2021)

Cakrawala

Ekonomi & Keuangan

Published by LPPM-STIE SWADAYA in collaboration
with STIE SWADAYA Jakarta

P-ISSN : 0854-7793
E-ISSN : 2714-643X

DETERMINASI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA KECAMATAN LAMPIRI PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR)

Adam^{1*}

^{1*}) STIESWADAYA(Akuntansi)

Jatiwaringin Raya No.36 (Jakarta Timur, 13620)

Email adamstieswadaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas perangkat Kecamatan, pemanfaatan aplikasi keuangan Kecamatan, dan peran badan permusyawaratan Kecamatan terhadap kualitas perangkat Kecamatan di Kecamatan LAMPIRI. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 responden yang terdiri atas ketua badan permusyawaratan Kecamatan, kepala Kecamatan, sekretaris Kecamatan, dan bendahara Kecamatan. berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas perangkat Kecamatan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan. sedangkan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan Kecamatan dan peran badan permusyawaratan Kecamatan tidak berpengaruh kualitas laporan keuangan Kecamatan.

Kata Kunci: *Kualitas Perangkat Kecamatan, Pemanfaatan Aplikasi Keuangan, Peran Badan Permasyarakatan , Kualitas Laporan Keuangan*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the quality of village officials, the use of village financial applications, and the role of village consultative bodies on the quality of village officials in Lampiri District. This research is a quantitative study with an associative approach. The sample in this study amounted to 36 respondents consisting of the head of the village consultative body, the village head, the village secretary, and the village treasurer. Based on the results of the tests carried out, it can be concluded that the quality of the village apparatus has an effect on the quality of village financial reports. while the use of village financial system applications and the role of village consultative bodies do not affect the quality of village financial reports.

Keywords: *Quality of Village Apparatus, Utilization of Village Financial Applications, Role of Village Consultative Bodies, Quality of Village Financial Reports*

PENDAHULUAN

Adanya Undang-Undang tentang Kecamatan sebagai payung dalam sistem otonomi Kecamatan, Kecamatan diberi otorisasi dalam pengelolaan tata pemerintah sendiri dan pembangunan

Kecamatan dalam meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian, pemerintah Kecamatan diberi keleluasan untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik Kecamatan. Penerimaan Kecamatan tentunya akan berdampak pada tuntutan tanggung jawab pengelolaan tersebut dari pengelola. Pemerintah Kecamatan diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (Kecamatan) serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Kecamatan. Laporan hasil pengelolaan keuangan Kecamatan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat. Pengungkapan laporan keuangan digunakan oleh masyarakat dalam memberi penilaian atas hasil kinerja aparatur Kecamatan serta sebagai media dalam menunjukkan good governance dalam pengelolaan keuangan Kecamatan.

Laporan keuangan adalah wadah untuk dapat menilai apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas perlu memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, maka perlu mempertimbangkan beberapa

faktor tertentu, diantaranya: Kualitas Perangkat, Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan, dan Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan.

Kualitas perangkat Kecamatan menjadi pilar utama dan penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi dari pemerintah Kecamatan. Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, jika tidak didukung oleh perangkat Kecamatan yang berkualitas. Adanya perangkat Kecamatan yang berkualitas maka pemerintah Kecamatan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas Perangkat Kecamatan berhubungan erat dengan Kualitas Laporan Keuangan. Suatu sistem perangkat Kecamatan yang telah memahami dan memiliki kompetensi dalam praktik akuntansi Kecamatan, keuangan Kecamatan, bahkan organisasional tentang pemerintahan sangat dibutuhkan. Hal ini berguna untuk menciptakan informasi laporan keuangan Kecamatan yang berkompeten.

Untuk mempermudah perangkat Kecamatan dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan Kecamatan salah satu instansi pemerintah yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menjalin kerjasama bersama pemerintah pusat daerah pemerintah daerah dalam mengembangkan aplikasi sistem keuangan Kecamatan serta melakukan pengawasan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Pemerintah Kecamatan di Kecamatan LAMPIRI, penggunaan aplikasi ini sudah berjalan semenjak bulan Mei 2017. Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan merupakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditujukan untuk peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah Kecamatan (BPKP, 2016). Fitur-Fitur yang telah disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan Kecamatan dibuat secara sederhana berbasis user friendly, yang akhirnya memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Aplikasi sangat mudah digunakan oleh pemerintah Kecamatan, hal ini dikarenakan fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Aplikasi ini bisa digunakan secara online maupun offline. Aplikasi ini telah disesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan serta dokumen- dokumen yang ada, sehingga dengan adanya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kecamatan.

Kemudian, Badan Permusyawaratan Kecamatan juga berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Kecamatan. Badan Permusyawaratan Kecamatan memiliki fungsi sebagai pengawas dari kinerja kepala Kecamatan diantaranya tentang kualitas laporan keuangan Kecamatan. Hal tersebut dilakukan karena Badan Permusyawaratan Kecamatan diberikan amanah oleh masyarakat Kecamatan untuk mengawasi pekerjaan yang belum maupun telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Sehingga peneliti tertarik untuk menguji pengaruh kualitas perangkat Kecamatan, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan Kecamatan, dan peran badan permusyawaratan Kecamatan terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan di Kecamatan LAMPIRI.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Stewardship Theory

Stewardship theory merupakan teori yang dibangun berdasarkan filosofis terkait sifat manusia yang dapat dipercaya untuk mampu bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab, memiliki integritas serta kejujuran terhadap pihak lain. Pada umumnya stewardship theory berfokus pada usaha untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut (Donaldson dan Davis, 1991).

Melalui stewardship theory, penelitian ini menjelaskan bagaimana menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik pada pemerintahan Kecamatan. Pemerintah Kecamatan bertindak sebagai steward, penerima amanah dituntut untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah Kecamatan. adapun Implikasi stewardship theory dalam penelitian ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat maupun pemerintah di atasnya dalam pengelolaan dana yang telah diberikan, agar digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, stewardship theory juga diharapkan dapat menjaga eksistensi pemerintah Kecamatan menjadi instansi yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik bagi publik, serta mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya yang akhirnya tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kualitas Perangkat Kecamatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan

Kualitas perangkat Kecamatan merupakan pilar utama penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi dari pemerintah Kecamatan. Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas perangkat Kecamatan yang memadai (Sudiarianti, et al, 2015). Perangkat Kecamatan yang memahami serta memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan akuntansi pada pengelolaan keuangan Kecamatan. adanya perangkat Kecamatan yang berkualitas dapat menghasilkan informasi-informasi laporan keuangan Kecamatan yang berkualitas (Surastiani dan Handayani, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan Atikah (2019) bahwa adanya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perangkat Kecamatan yang berkualitas maka semakin baik kualitas laporan keuangan Kecamatan. Adanya perangkat Kecamatan yang telah memiliki kompetensi, akan mampu menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif. Adanya perangkat Kecamatan yang berkualitas maka akan mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan Kecamatan yang berkualitas. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yakni:

H1: Kualitas Perangkat Kecamatan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan

Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan Siregar (2017) menjelaskan bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, memiliki peranan yang sangat penting untuk peningkatan kinerja organisasi atau instansi pemerintah yang olehnya meningkat kualitas laporan keuangan Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan implementasi e-government.

Hasil penelitian Wahyudi, et al (2019) bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan Kecamatan berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat Kecamatan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan adanya aplikasi, pemerintah Kecamatan akan mampu membuat laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perangkat Kecamatan dapat meningkatkan kualitas laporannya. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yakni:

H2: Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan

Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan

Badan Permusyawaratan Kecamatan merupakan lembaga yang berada pada level Kecamatan, Badan Permusyawaratan Kecamatan berperan sebagai pengawas atas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan. Adanya BPD sebagai pengawas ini akan membantu pemerintah Kecamatan peningkatan kualitas laporan keuangan Kecamatan.

Hasil penelitian Haza (2015), Azlan, et al (2019), dan Diani (2014) bahwa pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya peran dari Badan permusyawaratan akan mampu membantu pemerintah Kecamatan dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan dan pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan meningkatkan organisasi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yakni:

H3: Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Objek penelitian ini yakni Pemerintah Kecamatan di Kecamatan LAMPIRI Kabupaten Sumbawa yakni Kecamatan Pukat, Kecamatan Sebedo, Kecamatan Stowe Berang, Kecamatan Tengah, Kecamatan Bale Brang, Kecamatan Jorok, Kecamatan Labuhan Bajo, Kecamatan Motong, dan Kecamatan Orong Bawa. Metode pengumpulan data yakni melalui penyebaran kuesioner kepada responden dalam penelitian yakni kepala Kecamatan, sekretaris Kecamatan, bendahara Kecamatan, dan ketua badan permusyawaratan Kecamatan. sehingga jumlah responden dalam penelitian ini yakni 36 responden. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni variabel independen pertama yakni kualitas perangkat Kecamatan. untuk variabel kualitas perangkat Kecamatan peneliti menggunakan indikator dari penelitian Siregar, et al (2017) yakni jumlah perangkat Kecamatan yang memadai, latar belakang pendidikan akuntansi, uraian pekerjaan, peran dan tanggung jawab, kesesuaian uraian tugas dengan fungsi akuntansi, pedoman kerja bidang

akuntansi, sumber daya penduduk operasional, pelatihan teknis akuntansi/keuangan, serta penggunaan anggaran untuk mendukung kapasitas perangkat Kecamatan. kemudian variabel independen kedua yakni pemanfaatan aplikasi sistem keuangan Kecamatan dengan indikator terdiri dari mudah digunakan, kepuasan pengguna, data atau laporan yang dihasilkan cepat dan tepat waktu, dilengkapi keamanan, serta ekonomis (Wahyudi, et al, 2019). Variabel independen ketiga yakni peran badan permusyawaratan Kecamatan dengan indikator pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, evaluasi kegiatan, pencatatan transaksi berdasarkan bukti, pencatatan transaksi yang tepat waktu, dokumentasi bukti transaksi, sistem pengawasan tugas, serta laporan keuangan pemerintah Kecamatan sesuai standar (Azlan, et al, 2019).

Kemudian variabel dependen dalam penelitian ini yakni kualitas laporan keuangan Kecamatan dengan indikator yakni manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan, ketepatan waktu pelaporan keuangan, kelengkapan informasi yang disajikan, penyajian secara jujur, isi laporan keuangan dapat diverifikasi, keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan, serta isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya (Siregar, et al, 2017). Adapun tahapan dalam analisis data yakni mulai dari uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji kelayakan model, dan uji parsial. Dalam analisis data menggunakan alat bantu yakni Statistical Product and Service Solutions (SPSS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Utan

Kecamatan Utan merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumbawa Kecamatan utan juga berbatasan dengan Kecamatan buer di sebelah barat, Kecamatan Rhee disebelah Timur. Laut Flores di sebelah Utara, dan Kecamatan Batu lanteh di sebelah selatan. Kecamatan Utan terdiri dari Sembilan Kecamatan yang ada sudah tujuh Kecamatan diantaranya Kecamatan jorok, Kecamatan Tengah, Kecamatan Orong Bawa, Kecamatan Motong, Kecamatan Pukat, Kecamatan Sabedo dan Kecamatan Stowe Brang.

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas yang diperoleh adalah $n=36$, $\alpha=0,05$. Sehingga nilai product moment yakni 0,329. Dibawah disajikan hasil uji validitas hasil penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keputusan
KPD1	0,648	0,329	Valid
KPD2	0,349	0,329	Valid
KPD3	0,689	0,329	Valid
KPD4	0,488	0,329	Valid
KPD5	0,594	0,329	Valid
KPD6	0,511	0,329	Valid
KPD7	0,821	0,329	Valid
KPD8	0,685	0,329	Valid
KPD9	0,694	0,329	Valid
KPD10	0,686	0,329	Valid

PAS1	0,748	0,329	Valid
PAS2	0,816	0,329	Valid
PAS3	0,849	0,329	Valid
PAS4	0,703	0,329	Valid
PAS5	0,921	0,329	Valid
BPD1	0,422	0,329	Valid
BPD2	0,696	0,329	Valid
BPD3	0,866	0,329	Valid
BPD4	0,885	0,329	Valid
BPD5	0,908	0,329	Valid
BPD6	0,775	0,329	Valid
BPD7	0,515	0,329	Valid
LKD1	0,256	0,329	Tidak Valid
LKD2	0,182	0,329	Tidak Valid
LKD3	0,501	0,329	Valid
LKD4	0,493	0,329	Valid
LKD5	0,694	0,329	Valid
LKD6	0,751	0,329	Valid
LKD7	0,474	0,329	Valid

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 pernyataan dinyatakan tidak valid, hal ini dikarenakan nilai r hitung kurang dari r tabel yakni pada pernyataan pertama dan kedua pada variabel kualitas laporan keuangan Kecamatan. sehingga kedua pernyataan tersebut tidak diikutsertakan dalam pengujian selanjutnya. Namun pernyataan yang lain lulus dari uji validitas, hal ini dikarenakan nilai r hitung lebih dari r tabel.

Uji Reliabilitas

Dibawah ini disajikan hasil uji reliabilitas.

Tabel 2. Uji Hasil Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keputusan
Kualitas Perangkat Kecamatan	0,788	Reliabel
Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan	0,851	Reliabel
Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan	0,862	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan	0,675	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas maka seluruh variabel dinyatakan reliabel. Hal ini nilai cronbach alpha masing-masing variabel diatas 0,60.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Dibawah ini disajikan hasil uji normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Hasil
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,974

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan hasil uji kolmogrov-smirnov menunjukkan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0,974, nilai tersebut lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Dibawah ini disajikan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Variance Inflation Factor (VIF)	Keputusan
Kualitas Perangkat Kecamatan	0,723	1,383	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan	0,645	1,550	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan	0,632	1,583	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini lulus dari uji multikolinearitas. Hal ini dikarenakan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Dibawah ini disajikan tabel hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Tingkat Signifikansi	Keputusan
Kualitas Perangkat Kecamatan	0,596	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan	0,570	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan	0,319	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dikarenakan tingkat signifikansi hasil pengujian yang lebih dari 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini yakni:

$$LKD = \alpha + \beta_1.KPD + \beta_2.PAS + \beta_3.BPD + e$$

$$LKD = 1,833 + 0,682.KPD - 0,129.PAS + 0,058.BPD + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan Jika nilai variabel bebas diabaikan, maka nilai Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan sebesar 1,833. Variabel Kualitas Perangkat Kecamatan terhadap Kualitas Perangkat Kecamatan, koefisien regresi adalah positif mengalami kenaikan satu satuan dan variabel lain tetap maka nilai Kualitas Perangkat Kecamatan akan bertambah sebesar 0,682. Variabel Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan, koefisien regresi adalah negatif mengalami penurunan satu satuan dan variabel lain tetap maka nilai integritas akan berkurang sebesar -0,129. Variabel Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan, koefisien regresi adalah positif mengalami kenaikan satu satuan dan variabel lain tetap maka nilai independensi akan bertambah sebesar 0,058.

Uji Koefisien Determinasi

Dibawah ini disajikan hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Hasil
<i>Adjusted R Square</i>	0,279

Uji Kelayakan Model

Dibawah ini disajikan hasil uji kelayakan model

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model

Keterangan	Hasil
Nilai F	5,507
Nilai Signifikansi	0,004

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 5,507 yang mana dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas perangkat Kecamatan, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan Kecamatan dan peran badan permusyawaratan Kecamatan tidak secara serentak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan. Hal ini dikarenakan nilai F lebih besar dari 4. Nilai signifikansi juga menunjukkan angka 0,004 hal ini juga mendukung bahwa variabel kualitas perangkat Kecamatan, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan Kecamatan dan peran badan permusyawaratan Kecamatan tidak serentak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan, dikarenakan nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Uji Parsial (Uji t)

Dibawah ini disajikan hasil pengujian parsial.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

Variabel	t-Hitung	Nilai Signifikansi	Keputusan
Kualitas Perangkat Kecamatan	3,183	0,003	Hipotesis Diterima
Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan	-0,792	0,434	Hipotesis Ditolak
Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan	0,367	0,716	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diputuskan bahwa kualitas perangkat Kecamatan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan, di karena nilai t-hitung lebih dari t-tabel serta nilai signifikansi dibawah 0,05. Kemudian pemanfaatan aplikasi sistem keuangan Kecamatan dan peran badan permusyawaratan Kecamatan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan, dikarenakan nilai t-hitung kurang dari t-tabel dan nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Perangkat Kecamatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel kualitas perangkat Kecamatan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan. hal tersebut dikarenakan nilai t hitung lebih

besar dari t tabel ($t_{hitung} = 3,183 > t_{tabel} = 1,693$) dan nilai signifikansi 0,05. Kualitas perangkat Kecamatan merupakan pilar penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi dari pemerintah Kecamatan. Suatu sistem perangkat Kecamatan yang memahami dan memiliki kompetensi akuntansi Kecamatan, keuangan Kecamatan bahkan organisasional tentang pemerintahan sangat dibutuhkan. Hal ini berguna untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Perangkat Kecamatan yang berkualitas yang memiliki kemampuan baik dalam tingkat individu, organisasi dan kelembagaan maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam menciptakan kualitas laporan keuangan Kecamatan. Selaras dengan *stewardsip theory*, bahwa kepentingan rakyat dapat dimaksimalkan dengan membagi wewenang, hak, dan kewajiban diantara peranan dari semua perangkat Kecamatan. Perangkat Kecamatan pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain, sehingga perangkat Kecamatan lebih fokus pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi

Berdasarkan hasil pengujian, maka semakin baik kualitas perangkat Kecamatan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan Kecamatan yang dihasilkan. Perangkat Kecamatan yang memiliki kompetensi, akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020), Sudirianti (2015), Surastiani dan Handayani, (2015), Atikah, (2019), bahwa kualitas perangkat Kecamatan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas perangkat Kecamatan maka semakin baik kualitas laporan keuangan Kecamatan. Dimana perangkat Kecamatan yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif. Adanya perangkat Kecamatan yang berkualitas maka akan mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan Kecamatan yang berkualitas.

Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan terhadap Kualitas Laporan keuangan Kecamatan Hasil uji statistika parameter individual membuktikan bahwa variabel pemanfaatan aplikasi sistem keuangan Kecamatan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan. Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t_{hitung} = -0,792 < t_{tabel} 1,693$) dan nilai signifikansi 0,05. Hal ini berbanding terbalik dengan adanya *stewardship theory* mewajibkan perangkat Kecamatan untuk dapat menciptakan pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan di Kecamatan. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi atau instansi pemerintah yang olehnya meningkat kualitas laporan keuangan Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan e-government dalam menunjang penerapan *good government governance*

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diani, (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terlihat dari jawaban responden, terdapat responden yang menjawab tidak setuju terkait biaya pelaksanaan aplikasi lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Sehingga dengan adanya pemanfaatan aplikasi maka tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, padahal merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen Pemerintah Kecamatan Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik,

serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan seperti jaringan dan software. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelolah data transaksi keuangan dapat menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan

Hasil penelitian hipotesis menunjukkan bahwa peran badan permusyawaratan Kecamatan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($t_{hitung} = 0,367 < t_{tabel} = 1,693$) dan nilai signifikansi $0,05$. Adanya BPD dapat membantu pemerintah Kecamatan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Kecamatan melalui pengawasan yang dilakukannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri et al, (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran Internal Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari distribusi jawaban responden, di mana terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju bahwa BPD mengawasi pencatatan transaksi berdasarkan bukti, BPD mengawasi pencatatan transaksi dengan tepat waktu, dan BPD mengawasi dokumen bukti transaksi yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan. Kemudian responden juga menjawab tidak setuju bahwa BPD melakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan BPD mengevaluasi sistem pengawasan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kepala Kecamatan. Hal ini dirasakan oleh beberapa responden bahwa BPD kurang aktif dalam menjalankan tugasnya, sehingga dari hal tersebut adanya BPD tidak dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kecamatan pada Pemerintah Kecamatan Lampiri Pondok Kelapa Jakarta Timur

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haza, (2015), Azlan, (2019) dan Diani (2014) bahwa pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya peran badan permusyawaratan Kecamatan dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan dan pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan meningkat organisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kualitas perangkat Kecamatan, pemanfaatan aplikasi sistem keuangan Kecamatan dan peran badan permusyawaratan Kecamatan terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Kualitas Perangkat Kecamatan berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan Kecamatan. Hal ini berarti dengan adanya Kualitas perangkat Kecamatan yang merupakan pilar penggerak roda organisasi dalam usaha untuk mewujudkan visi dan misi dari pemerintah Kecamatan. Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas perangkat Kecamatan yang memadai. Perangkat Kecamatan yang memahami dan memiliki kompetensi dalam akuntansi Kecamatan, keuangan Kecamatan, bahkan organisasional tentang pemerintahan sangat dibutuhkan. Hal ini berguna untuk menghasilkan informasi laporan keuangan Kecamatan yang berkualitas.

2.Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Kecamatan tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan Kecamatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi sebaik apapun yang dimiliki oleh aparat Kecamatan tidak dapat menjamin apakah kualitas laporan keuangan Kecamatan yang dihasilkan akan berkualitas.

3.Peran Badan Permusyawaratan Kecamatan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Kecamatan mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah Kecamatan tidak menjamin apakah kualitas laporan keuangan Kecamatan yang dihasilkan akan berkualitas.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan responden dalam penelitian ini seperti kepala seksi dan tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah pemerintah Kecamatan tersebut. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kecamatan Lampiri Pondok Kelapa Jakarta Timur lebih meningkatkan kualitas, memanfaatkan secara maksimal, dan meningkatkan peran BPD dalam pengawasan keuangan Kecamatan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(2), 188-198.
- Atikah, A. (2019). Pengaruh Sistem Keuangan Kecamatan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan (Studi Empiris pada Kecamatan di Wilayah Sitobondo). Skripsi. Universitas Jember.
- Dewi, E. S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kecamatan (Studi Pada Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Ceper). Skripsi. Universitas Widya Dharma.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(1): 1-23.
- Donaldson, L & Davis, J.H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*. 16(2): 49-64.
- Fikri, M. A., B. A. Inapty, & R. R. S. P. Martiningsih. (2016). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. *Akuntabilitas*, 9(1): 27-42.

- Haza, I. I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1): 1- 19.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kecamatan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Siregar, S. H. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Satuan Kerja di Lingkungan Kerja KPPN Balige. Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. G. K. ., & Budiasih, I. G. (2015). Pendahuluan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
- Surastiani, D. P. dan B. D. Handayani. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 7(2): 139-149.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kecamatan. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Wahyudi, A., Ngumar, S., & Suryono, B. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial perangkat Kecamatan (studi pada perangkat Kecamatan di kabupaten sumbawa). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 111-131.